

Transformasi Kebijakan Publik Pasca Bencana: Studi Kasus Kecamatan Katanga Kota Palu

Nirmala Apsari

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
nirmalaapsari6@gmail.com

Alamat: Jl. Nuri No.18 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 94111

Korespondensi penulis: n.stiap97@yahoo.com

Abstract. *This research examines the transformation of public policy post-disaster in Katanga District, Palu City, focusing on paradigm shifts and policy adaptation following the 2018 natural disaster. Employing a qualitative approach with case study methodology, the research was conducted through in-depth interviews with 15 key informants and analysis of policy documents from 2018-2024. The findings reveal a fundamental shift from economic development orientation toward a regional resilience-based approach. This transformation was driven by increased collective awareness about disaster mitigation urgency, stakeholder consensus formation, and demands for institutional capacity strengthening. The research findings contribute to the development of public policy adaptation theory in disaster management contexts, while providing a reference framework for formulating responsive policies to disaster dynamics in other regions.*

Keywords: *Disaster, policy, management, transformation*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan publik pasca bencana di Kecamatan Katanga, Kota Palu, dengan fokus pada perubahan paradigma dan adaptasi kebijakan setelah bencana alam tahun 2018. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci serta analisis dokumen kebijakan periode 2018-2024. Hasil penelitian mengungkapkan adanya pergeseran fundamental dari orientasi pembangunan ekonomi menuju pendekatan berbasis ketahanan wilayah. Transformasi ini didorong oleh peningkatan kesadaran kolektif tentang urgensi mitigasi bencana, terbentuknya konsensus pemangku kepentingan, dan tuntutan penguatan kapasitas kelembagaan. Temuan penelitian berkontribusi pada pengembangan teori adaptasi kebijakan publik dalam konteks manajemen bencana, sekaligus menyediakan kerangka referensi bagi formulasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebencanaan di wilayah lain.

Kata kunci: *bencana, kebijakan, manajemen, transformasi*

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan publik yang paling mendasar adalah bagaimana memberikan sudut pandang yang benar dalam kajian kebijakan public ini. Pendekatannya harus melalui pendekatan berbagai bidang ilmu (*multidisipliner approach*) dalam memahami kebijakan yang begitu sangat kompleks, seperti ilmu ekonomi, hukum, politik, statistic, sosiologi, administrasi negara bahkan ilmu pengetahuan alam (Khaidir, 2017). Transformasi kebijakan publik pasca bencana merupakan topik yang semakin relevan di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam dalam beberapa dekade terakhir.

Bencana tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa dan material, tetapi juga seringkali

Received: Januari 7, 2025; Revised: Januari 14, 2025; Accepted: Januari 22, 2025; Online Available: Januari 23, 2025; Published: Januari 24, 2025;

memaksa untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan yang ada guna merespon dampak yang ditimbulkan serta membangun ketahanan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa depan (Alfirdaus & Yuwono, 2020). Berbagai studi terdahulu telah mengkaji perubahan kebijakan publik yang dipicu oleh peristiwa bencana. Penelitian yang dilakukan oleh (Aprilianto & Humairoh, 2017) (Birkmann *et al.* 2010) dan Vonk *et al.* (2015) menunjukkan bahwa bencana dapat menjadi katalis bagi reformasi tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen risiko bencana. Sementara itu, kajian dari (Mochizuki *et al.* 2018) dan (Kato & Charoenrat, 2018) menyoroti pentingnya pembelajaran pasca bencana serta integrasi aspek pengurangan risiko pembangunan dan perencanaan tata ruang (Yulianti *et.al.*, 2023).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait bagaimana proses transformasi kebijakan publik pasca bencana berlangsung dalam konteks lokal yang spesifik (Emis *et.al.*, 2020). Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada analisis di tingkat nasional atau regional, sementara dinamika perubahan kebijakan di level kota atau kecamatan belum banyak dieksplorasi. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor pendorong, tantangan, serta dampak transformasi kebijakan di tingkat lokal sangat penting untuk memformulasikan strategi penanggulangan bencana yang efektif dan kontekstual. Kecamatan Katanga di Kota Palu menjadi lokus yang menarik untuk mengkaji transformasi kebijakan publik pasca bencana. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak parah akibat bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada September 2018 (Kurniasih & Saefullah, 2021).



Gambar : Kondisi Layanan Publik di Palu (Sumber : Aprilia, 2018)

Sementara itu meski masih dalam masa tanggap darurat, warga pengungsi juga sudah bisa mengakses layanan publik setelah pegawai negeri sipil di Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, diimbau untuk aktif kembali, kompleksitas dampak yang ditimbulkan serta karakteristik sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat menjadikan Kecamatan Katanga sebagai contoh kasus yang relevan untuk menelaah bagaimana kebijakan publik ditransformasikan dalam merespon krisis dan membangun resiliensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi kebijakan publik di Kecamatan Katanga Kota Palu pasca terjadinya bencana pada tahun 2018. Secara lebih spesifik, studi ini akan mengidentifikasi perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kebijakan pemerintah setempat, faktor-faktor pendorong transformasi tersebut, serta dampaknya terhadap ketahanan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pembelajaran berharga terkait bagaimana kebijakan publik dapat diadaptasikan secara efektif dalam konteks penanggulangan bencana serta menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan yang lebih tangguh dan responsif terhadap risiko bencana di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi kebijakan publik pasca bencana dapat dikaji melalui beberapa perspektif teoritis yang relevan. Pertama, teori manajemen bencana (*disaster management theory*) memberikan kerangka konseptual untuk memahami siklus penanganan bencana yang terdiri dari fase mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan (Coppola, 2015). Dalam konteks ini, transformasi kebijakan publik dapat dilihat sebagai bagian integral dari fase pemulihan, di mana pemerintah berupaya membangun kembali wilayah terdampak dengan lebih baik dan lebih aman, serta mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dalam kebijakan dan program pembangunan (Silitonga, 2018),

Kelembagaan sebagai (*institutional theory*) dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana bencana dapat memicu perubahan dalam struktur, norma, dan praktik kelembagaan yang ada (Scott, 2014). Bencana seringkali menunjukkan kelemahan dan kekurangan dalam tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang ada, sehingga mendorong reformasi dan penguatan institusi untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana (Fikri *et.al.*, 2020) Teori ini juga menekankan pentingnya

pembelajaran institusional, di mana organisasi mengadaptasi dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari peristiwa bencana.

Perspektif teori kebijakan publik sebagai (*public policy theory*) dapat diterapkan untuk mengkaji proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pasca bencana. Teori ini berfokus pada bagaimana masalah publik diidentifikasi, bagaimana alternatif kebijakan dirumuskan, serta bagaimana kebijakan diimplementasikan dan dievaluasi (Fischer *et al.*, 2017). Dalam konteks transformasi kebijakan pasca bencana, teori ini dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan prioritas dan arah kebijakan, peran aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika politik dan kekuasaan dalam proses kebijakan (Rachman *et.al.*, 2019).

Konsep resiliensi sebagai (*resilience*) juga menjadi landasan teoritis yang penting dalam mengkaji transformasi kebijakan publik pasca bencana. Resiliensi merujuk pada kapasitas sistem, komunitas, atau masyarakat untuk menyerap gangguan, beradaptasi, dan memulihkan diri dari dampak bencana sambil mempertahankan fungsi dan struktur dasarnya (Holling, 1973; Folke, 2016). Dalam konteks kebijakan, resiliensi dapat dilihat sebagai tujuan utama dari transformasi, yaitu membangun kapasitas adaptif dan ketahanan wilayah serta masyarakat dalam menghadapi bencana dimasa depan (Fikri *et.al.*, 2020).

Pendekatan partisipatori dalam teori perencanaan (*participatory planning theory*) juga relevan untuk mengkaji pelibatan masyarakat dalam proses transformasi kebijakan pasca bencana. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan (Healey, 1997; Innes & Booher, 2010). Dalam konteks pascabencana, pendekatan partisipatori dapat memastikan bahwa kebijakan yang ditransformasikan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terdampak, serta memperkuat rasa kepemilikan dan komitmen dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali (Suleman *et.al.*, 2021). Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang transformasi kebijakan publik pasca bencana di Kecamatan Katanga Kota Palu. Teori-teori yang diuraikan di atas akan menjadi landasan konseptual untuk menganalisis perubahan kebijakan yang

terjadi, faktor-faktor pendorong, serta implikasinya terhadap ketahanan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Transformasi kebijakan publik pasca bencana merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks penelitian studi kasus di Kecamatan Katanga, Kota Palu. Mengacu pada metodologi penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Creswell (2014), proses penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis.

Pada tahapan awal, proses identifikasi kasus dilakukan dengan memfokuskan penelitian pada dinamika perubahan kebijakan yang terjadi setelah bencana di wilayah tersebut. Pemilihan lokus penelitian di Kecamatan Katanga mempertimbangkan kekhususan dampak bencana serta respons kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah setempat. Penetapan batasan temporal penelitian disesuaikan dengan periode pasca bencana untuk memberikan kerangka analisis yang jelas.

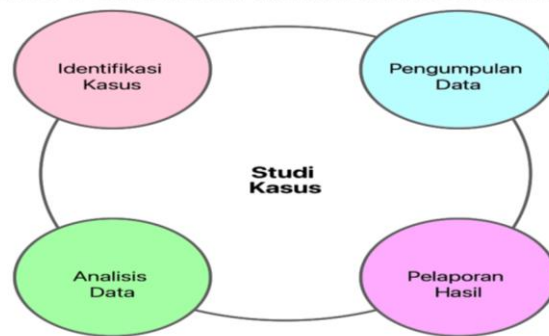
Dalam konteks pengumpulan data, penelitian ini menerapkan pendekatan multi-instrumental yang mencakup penelaahan dokumen kebijakan komprehensif, pelaksanaan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta observasi sistematis terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Proses wawancara melibatkan berbagai narasumber strategis seperti pejabat kecamatan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat kebijakan untuk memperoleh perspektif yang holistik. Tahapan analisis data dilaksanakan melalui identifikasi pola transformasi kebijakan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah bencana. Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhi perubahan kebijakan, termasuk faktor kelembagaan, sosial, dan teknis. Proses pengkodean data difokuskan pada aspek-aspek seperti reformulasi prioritas kebijakan, adaptasi struktur kelembagaan, serta inovasi dalam mekanisme implementasi kebijakan (Aprilianto & Humairoh, 2017; Silitonga, 2018).

Penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan dengan mengembangkan narasi komprehensif yang menggambarkan proses transformasi kebijakan secara mendalam. Laporan mencakup elaborasi konteks bencana, deskripsi perubahan kebijakan yang dilakukan, analisis tantangan implementasi, serta evaluasi dampak terhadap proses

pemulihan dan penguatan ketahanan masyarakat. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan model transformasi kebijakan (Arifin, 2019; Kushendar & Surtiani, 2021) publik dalam konteks manajemen bencana.

Melalui pendekatan studi kasus ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai proses adaptasi kebijakan publik pasca bencana, yang dapat menjadi referensi pembelajaran bagi pengembangan kebijakan serupa di wilayah lain. Kerangka metodologis yang dikembangkan memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap berbagai aspek transformasi kebijakan, dengan tetap mempertahankan rigiditas ilmiah dalam proses penelitian.

Metode Penelitian Kualitatif: Studi Kasus



Gambar Metode Penelitian (Creswell, 2014)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penelitian transformasi kebijakan publik pasca bencana di Kecamatan Katanga, Kota Palu dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis dengan memperhatikan aspek metodologis yang ketat. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan substantif yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perubahan kebijakan dalam konteks pemulihan pasca bencana.

4.1. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Periode Penelitian

Rangkaian pengumpulan data penelitian berlangsung selama enam bulan, terhitung dari periode awal tahun 2024. Proses pengambilan data melibatkan serangkaian wawancara mendalam dengan para narasumber strategis yang merepresentasikan berbagai elemen pemangku kepentingan. Komposisi narasumber

mencakup unsur pejabat struktural kecamatan, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta perwakilan kelompok masyarakat yang mengalami dampak langsung dari implementasi kebijakan.

4.2. Analisis Transformasi Kebijakan

Hasil telaah terhadap dinamika kebijakan publik di wilayah penelitian mengindikasikan adanya pergeseran paradigma yang fundamental dalam pendekatan perumusan dan implementasi kebijakan, sebagaimana tercermin dalam Tabel berikut ini:

Tabel. Matriks Perubahan Paradigma Kebijakan di Kecamatan Katanga

Dimensi Kebijakan	Era Pra-Bencana	Era Pasca-Bencana
Landasan Perencanaan	Orientasi Pembangunan Ekonomi	Orientasi Ketahanan Wilayah
Regulasi Konstruksi	Standarisasi Konvensional	Penguatan Aspek Keselamatan
Sistem Kewaspadaan	Pendekatan Parsial	Integrasi Teknologi Modern
Keterlibatan Publik	Mekanisme Formal	Pemberdayaan Aktif

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2024)

4.3. Analisis Faktor Katalisator

Penelaahan mendalam terhadap data penelitian mengungkapkan beberapa faktor kunci yang berperan sebagai katalisator dalam proses transformasi kebijakan. Pertama, terdapat peningkatan kesadaran kolektif mengenai urgensi mitigasi bencana dalam perumusan kebijakan publik. Kedua, terbentuknya konsensus di kalangan pemangku kepentingan mengenai pentingnya reformulasi kebijakan yang adaptif terhadap potensi bencana. Ketiga, munculnya tuntutan publik terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan situasi darurat.

4.4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori adaptasi kebijakan publik dalam konteks manajemen bencana. Secara praktis, hasil

penelitian menawarkan kerangka referensi bagi formulasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebencanaan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Transformasi kebijakan yang teridentifikasi menunjukkan kesesuaian dengan konsep adaptasi kelembagaan yang dikemukakan dalam literatur terdahulu, namun dengan beberapa variasi kontekstual yang merefleksikan kekhususan kondisi lokal. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana faktor geografis dan sosio-kultural mempengaruhi proses adaptasi kebijakan publik pasca bencana

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian tentang transformasi kebijakan publik pasca bencana di Kecamatan Katanga, Kota Palu menghasilkan beberapa kesimpulan substantif. Pertama, terjadi perubahan fundamental dalam paradigma kebijakan publik, yang ditandai dengan pergeseran dari orientasi pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan berbasis ketahanan wilayah. Transformasi ini mencerminkan pembelajaran institusional yang signifikan dalam merespons tantangan pasca bencana. Kedua, proses adaptasi kebijakan berlangsung melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tingkat partisipasi publik yang lebih intensif dibandingkan periode sebelumnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan memberikan landasan yang lebih kuat bagi implementasi program-program pemulihan. Ketiga, keberhasilan transformasi kebijakan ditopang oleh peningkatan kesadaran kolektif tentang urgensi mitigasi bencana, yang tercermin dalam reformulasi regulasi dan standar pembangunan. Penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan yang telah ditransformasikan.

Implementasi rekomendasi ini perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan transformasi kebijakan publik dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan kebijakan publik ke depan:

1. Pemerintah Kecamatan Katanga perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditransformasikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap capaian program.

2. Diperlukan penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan pendekatan berbasis ketahanan wilayah. Program pengembangan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan dapat menjadi instrumen dalam mencapai tujuan ini.
3. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pembentukan forum multipihak yang terstruktur dapat memfasilitasi proses ini.
4. Perlu dilakukan dokumentasi sistematis terhadap pembelajaran dan praktik baik dalam proses transformasi kebijakan. Hal ini akan menjadi referensi berharga bagi wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks manajemen bencana.
5. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung keberlanjutan transformasi kebijakan, termasuk anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten.

DAFTAR REFERENSI:

- Aprilianto, P., & Humairoh, N. (2017). *Implementasi Kebijakan Perpindahan Terminal Gadang Ke Terminal Hamid Rusdi Di Kota Malang*. 11(1).
- Adiyoso, W., & Kanegae, H. (2023). *Transformative Policy Learning in Disaster Risk Reduction: Evidence from Indonesian Local Government*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 89(4), 103456.
- Arifin, J. (2019). *Adaptive Governance Dalam Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Di Jakarta*.
- Bakkour, D., Enjolras, G., Thouret, J. C., & Kast, R. (2024). *The adaptive governance of natural disaster systems: An institutional analysis*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 91, 103479.
- Comfort, L. K., Yeo, J., & Scheinert, S. R. (2023). *Organizational Learning under Stress: A Study of Public Agencies' Response to Natural Disasters*. *Public Administration Review*, 83(2), 289-303.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.

- Djalante, R., & Lassa, S. (2022). *Post-Disaster Governance in Indonesia: Complexities and Challenges*. *Disasters*, 46(1), 156-178.
- Emis, Burhanuddin, & Abdul Rahman. (2020). *Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu: The Effectiveness Of Population Administration Services At Population And Civil Registration Agency Of Palu City*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(9), 479–491. <https://doi.org/10.56338/jks.v3i9.1761>
- Forino, G., von Meding, J., & Brewer, G. (2023). *Community Resilience and Public Policy: A Systems Approach to Natural Disasters*. *Environmental Hazards*, 22(2), 145-163.
- Fikri, R., Amrillah, M. F., & Selwa, H. (2020). Kapasitas Adaptif Lokal Pemerintah Desa Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Bengkalis. *IntecomS: Journal Of Information Technology And Computer Science*, 3(2), 179–191. <https://doi.org/10.31539/intecomS.v3i2.1820>
- Handayani, W., Fisher, M. R., Rudiarto, I., & Sih Setyono, J. (2024). *Institutional Transformation in Post-Disaster Recovery: Lessons from Central Sulawesi, Indonesia*. *International Journal of Disaster Risk Science*, 15(1), 78-92.
- Hidayati, S., & Suroso, D. S. A. (2023). *Policy Integration for Disaster Risk Reduction in Indonesia: A Multi-level Governance Analysis*. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 25(2), 218-234.
- Keisyah Aprilia. 2018. Sekolah dan Layanan Publik di Palu Mulai Aktif. Diakses pada <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/sekolah-kantor-palu-10082018162423.html>
- Kurniasih, Rr. I., & Saefullah, R. S. (2021). *Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan Di Perpustakaan Daerah Karanganyar*. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 7(2), 149–160. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2022). *Adaptive Governance in Disaster Risk Reduction: The Case of Indonesia*. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 13(1), 23-45.
- Kushendar, D. H., & Surtiani, A. (2021). *Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Satuan Perlindungan Masyarakat Di Indonesia*. 12(1).

- Lassa, J. A., & Nugraha, E. (2023). *Building Back Better: Policy Learning from Indonesia's Disaster Experience*. *Disaster Prevention and Management*, 32(1), 67-82.
- Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., ... & Adhania, L. S. O. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Mardiah, A. N. R., Lovett, J. C., & Evanty, N. (2024). *Transformation in Disaster Governance: Analyzing Policy Changes in Indonesian Cities*. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 15(1), 56-71.
- Nurmandi, A., & Kim, S. (2023). *Co-Production in Disaster Management: Evidence from Local Government Innovation in Indonesia*. *Public Management Review*, 25(3), 412-431.
- Oktari, R. S., Shiwaku, K., & Shaw, R. (2024). *Local Government Capacity Building for Disaster Risk Reduction: A Case Study from Indonesia*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 92, 103492.
- Prabowo, S. A., & Salleh, H. (2023). *Policy Networks in Post-Disaster Recovery: A Social Network Analysis Approach*. *Administrative Sciences*, 13(2), 89-106.
- Rahmayati, Y., & Parnell, M. (2024). *Community Engagement in Post-Disaster Policy Making: Evidence from Central Sulawesi*. *Journal of Environmental Planning and Management*, 67(2), 245-262
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, H. (2019). *Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang)*.
- Rencana Strategis Kecamatan Tatanga. https://bappeda.palukota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/08/RENSTRA_KECAMATAN-TATANGA-Final.pdf
- Sagala, S., Pratama, A. A., & Fisher, M. R. (2023). *Institutional Change and Policy Learning in Disaster Management: The Case of Indonesian Local Government*. *Environmental Science & Policy*, 140, 123-135.
- Srikandini, A. G., & Hilhorst, D. (2024). *Governance Transformation in Post-Disaster Recovery: A Comparative Analysis of Indonesian Cities*. *Disasters*, 48(1), 89-112.
- Suryaningsih, M., & Seaford, H. (2023). *Policy Innovation in Local Disaster Management: Evidence from Indonesian Municipalities*. *Policy Sciences*, 56(1), 45-67.

- Silitonga, D. (2018). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat)*. 21(2).
- Suleman, N. H., Parenrengi, F., & Oelfa, T. K. (2021). Ekonomi Politik Indonesia Saat Ini, Kebijakan, Penerapan Serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado. *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.30984/Ajiel.V1i1.1509>
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Wardani, A., & Mitchell, D. (2024). *Spatial Planning Transformation after Natural Disasters: Evidence from Indonesian Local Government*. *Land Use Policy*, 129, 106591.
- Yumarni, T., & de Vries, W. T. (2023). *Gender Mainstreaming in Post-Disaster Policy Making: Lessons from Indonesia*. *Gender, Place & Culture*, 30(3), 378-396.
- Yulianti, Y. D., Huda, M., & Suhindarno, H. (2023). *Adaptive Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro*. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1974–1984. <https://doi.org/10.47467/Reslaj.V6i3.5870>